

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

I. Perkembangan Inflasi Daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya jasa dan resiko kedepan pada Triwulan III Tahun 2022.

Perkembangan Indeks Harga Konsumen Inflasi Provinsi Jambi Periode Bulan September 2022 Kota Jambi tercatat Inflasi 0,61 % (mtm), tahunan Inflasi 8,09% (yoy) dan Tahun berjalan Inflasi 6,34 % ytd) dan Deflasi Nasional sebesar 1,17 % (mtm), secara bulanan realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 1,19% (mtm) atau inflasi sebesar 7,70% (yoy). Terdapat beberapa kelompok bahan pangan yang sempat mengalami kenaikan dan penurunan pada bulan September 2022.

Kabupaten Sarolangun merupakan salah satu Kabupaten yang bukan termasuk dalam IHK tetapi termasuk dalam salah satu Kabupaten Non IHK sehingga perhitungan inflasi Kabupaten Sarolangun mengacu kepada Kabupaten Muara Bungo yang merupakan salah satu TPID sampel Provinsi Jambi, alasan Kabupaten Sarolangun mengacu kepada Kabupaten Muara Bungo karena merupakan Kabupaten terdekat yang diambil sampel IHK.

Pada Bulan September 2022 Kabupaten Muara Bungo tercatat mengalami inflasi 1,10 % (mtm) tahunan Inflasi 8,55 % (yoy) dan tahun berjalan Inflasi 6,56 % (ytd), Inflasi Kota Muara Bungo terjadi karena adanya penurunan indeks harga pada kelompok pengeluaran yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar -1,71 persen. Komoditas penyumbang inflasi terbesar di Kota Muara Bungo adalah : Bensun, beras, solar, angkutan antar kota dan daging ayam ras. Sedangkan Komoditi penyumbang deflasi Kota Muara Bungo adalah : cabe merah, bawang merah, minyak goreng, ikan nila dan tomat.

Berdasarkan evaluasi dan pemantauan perkembangan harga rata-rata kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya di Kabupaten Sarolangun untuk Triwulan III pada Bulan Juli s/d September 2022 rata-rata harga Kebutuhan bahan pokok dan bahan penting lainnya rata-rata stabil dan ada mengalami kenaikan dan penurunan harga, serta tidak ditemukan fluktuasi harga yang dapat membahayakan inflasi seputaran komoditi di Kabupaten Sarolangun. Kebutuhan bahan pokok akan mengalami perubahan harga di Pasar Atas di Kabupaten Sarolangun seperti : cabe merah, cabe rawit, bawang merah, minyak sayur kemasan, daging ayam, telur ayam ras dan sayuran. Berikut adalah data harga rata-rata bulanan komoditas di Pasar Atas Kabupaten Sarolangun :

1. Harga bawang Putih minggu ke I sebesar Rp. 24.000,-/Kg pada minggu ke II stabil sebesar Rp. 24.000,-/Kg pada minggu ke III mengalami penurunan sebesar Rp. 23.000,- dan pada minggu ke IV penurunan sebesar Rp. 22.000,-/Kg.
2. Harga bawang Merah minggu ke I sebesar Rp. 40.000,-/Kg, pada minggu ke II stabil sebesar Rp. 40.000,- pada minggu ke III mengalami penurunan sebesar Rp. 30.000,- dan pada minggu ke IV mengalami kenaikan sebesar Rp. 35.000,-/Kg.
3. Harga cabe merah keriting dan besar minggu ke I sebesar Rp. 80.000,-/Kg, pada minggu ke II mengalami penurunan sebesar Rp. 76.000,- pada minggu ke III mengalami penurunan sebesar Rp. 60.000,- dan pada minggu ke IV mengalami penurunan sebesar Rp. 50.000,-/Kg.
4. Harga cabe rawit hijau minggu ke I Rp. 34.000,-/Kg pada minggu ke II mengalami kenaikan sebesar Rp. 42.000,-/Kg, pada minggu ke III stabil sebesar Rp. 42.000,-/Kg dan

ke IV mengalami penurunan sebesar 32.000,-/Kg.

5. Harga Gula Pasir minggu ke I sebesar Rp. 13.000,-/Kg, pada minggu ke II stabil sebesar Rp. 13.000,- pada minggu ke III stabil sebesar 13.000,- dan pada minggu ke IV stabil sebesar Rp. 13.000,-/Kg.
6. Harga Minyak sayur kemasan minggu ke I sebesar Rp. 14.000,-/Kg, stabil pada minggu ke II sebesar Rp. 14.000,- pada minggu ke III stabil sebesar Rp. 14.000,- dan pada minggu ke IV stabil sebesar 14.000,-/Kg.
7. Harga Daging Ayam Kampung minggu ke I Rp. 61.000,-/Kg pada minggu ke II Stabil sebesar Rp. 61.000,- pada minggu ke III stabil sebesar Rp. 61.000,- dan pada minggu ke IV stabil sebesar 61.000,-/Kg.
8. Harga Daging Ayam Broiler minggu ke I Rp. 36.000,-/Kg pada minggu ke II mengalami penurunan sebesar Rp. 35.000,-/Kg, pada minggu ke III stabil sebesar Rp. 35.000,-/Kg dan ke IV stabil sebesar 35.000,-
9. Harga Daging Sapi/Kerbau minggu ke I Rp. 140.000,-/Kg pada minggu ke II stabil sebesar Rp. 140.000,-/Kg, pada minggu ke III stabil sebesar Rp. 140.000,-/Kg dan ke IV stabil sebesar 140.000,-/Kg.
10. Harga Telur Ayam Ras minggu ke I Rp. 38.000,-/Karpas pada minggu ke II mengalami kenaikan sebesar Rp. 45.000,-/Karpas, pada minggu ke III mengalami penurunan sebesar Rp. 42.000,-/Kg dan ke IV stabil sebesar 42.000,-/Kg.
11. Harga gas LPG 3 kg di pangkalan 18.000,-/Tabung (HET) dan di pengecer/toko mengalami kenaikan menjadi Rp.20.000,- s/d 25.000.

Pada Bulan September 2022 Kabupaten Muara Bungo tercatat mengalami inflasi 1,10 % (mtm) tahunan Inflasi 8,55 % (yoy) dan tahun berjalan Inflasi 6,56 % (ytd), Inflasi Kota Muara Bungo terjadi karena adanya penurunan indeks harga pada kelompok pengeluaran yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar -1,71 persen. Komoditas penyumbang inflasi terbesar di Kota Muara Bungo adalah : Bensin, beras, solar, angkutan antar kota dan daging ayam ras. Sedangkan Komoditi penyumbang deflasi Kota Muara Bungo adalah : cabe merah, bawang merah, minyak goreng, ikan nila dan tomat.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

2.1. Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sarolangun Triwulan III Tahun 2022.

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan tekanan terhadap Deflasi dan Inflasi lebih tinggi dari perkiraan antara lain :

- Dengan Kondisi perubahan iklim yang sulit diantisipasi pada triwulan III Tahun 2022 produksi pangan yang rentan dalam pasokan yang dapat mengganggu produksi dan kelancaran distribusi bahan pangan, dikuatirkan jumlah pasokan tidak sesuai, sehingga harga komoditas pertanian saat ini akan mengalami penurunan yang begitu dratis.
- Pertumbuhan Perekonomian di Kabupaten Sarolangun mengalami penurunan yang menjadi dampak pandemi Covid-19.
- Permasalahan di daerah dengan karakteristik wilayah yang berbeda sehingga membutuhkan penanganan, masing-masing daerah memiliki keunikan yang saling terkait dengan daerah lainnya, sehingga penanganannya perlu sinergi dan terbatasnya kapasitas produksi dalam daerah terutama produktivitas yang rendah dan luas lahan semakin menyusut.

Menjaga ketersediaan pasokan pangan, menjaga Stabilitas Harga Bahan Pangan Pokok dan mengantisipasi tidak ada penimbunan bahan pangan.

- Melaksanakan Sidak Pasar, Swalayan, SPBU dan Agen Gas LPG 3 Kg, melaksanakan Pasar Murah/Operasi Pasar guna menstabilisasi harga bahan pokok terlalu berlebihan.
- Menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memborong barang-barang terlalu berlebihan dan melaksanakan pemantauan panen pada petani terutama petani cabe, sayur-mayur, Padi dan buah-buahan.
- Kabupaten Sarolangun masih terdapat beberapa kebutuhan bahan pokok yang didatangkan dari luar daerah Kabupaten Sarolangun seperti beras, bawang merah, bawang putih, kentang, kol/kubis, cabe, dan ikan (dari daerah Kabupaten Kerinci, Kab. Merangin, Kota Linggau, Kabupaten Rejang Lebong).
- Mendorong kerja sama antar daerah dalam mengendalikan inflasi, perluasan akses pasar dengan memperkuat kerja sama daerah dan diperluas ke seluruh daerah.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

3.1. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

A. KEGIATAN KOORDINASI TPID SAROLANGUN

Sebagai upaya pemerintah daerah dalam rangka melakukan stabilitas harga dan ketersediaan terhadap sejumlah bahan kebutuhan bagi masyarakat, melalui TPID melaksanakan koordinasi ke TPID Provinsi Jambi terkait sinkronisasi program serta melaporkan keadaan dan perkembangan TPID Kabupaten Sarolangun. Koordinasi juga dilakukan antar lini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sarolangun untuk memaksimalkan kinerja dan merumuskan kebijakan yang tepat dalam pengendalian, upaya lain dalam melakukan koordinasi terkait dengan data inflasi di Kabupaten Sarolangun untuk menjadi evaluasi dan kontrol dalam mengantisipasi inflasi yang ada di Kabupaten Sarolangun sehingga informasi dan perkembangan program TPID diperbarui disetiap saat dalam perjalanannya.

B. PELAKSANAAN PROGRAM KERJA TRIWULAN II TAHUN 2022

Kegiatan TPID Kabupaten Sarolangun yang dilaksanakan pada Triwulan III Bulan Juli 2022 s/d September 2022 antara lain :

1. Pemantauan harga-harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya.

1. Pemantauan harga-harga komoditas bahan pokok dan bahan penting lainnya dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun dan Dinas Ketahanan Pangan setiap hari dan Laporan Bulanan disampaikan ke pada Bapak Bupati Sarolangun Cq. Bagian Bina Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Sarolangun. Pemantauan dilakukan pasar atas Sarolangun dan Pasar Sungai Benteng Kecamatan Singkut. Pemantauan pergerakan harga bahan kebutuhan pokok yang meliputi antara lain : beras, cabai merah, cabe rawit, bawang merah, bawang putih, daging sapi, daging ayam boiler, telur ayam, minyak goreng/Curah dan gula.
2. Pada Hari Jum'at Tanggal 16 September 2022 Operasi Pasar beberapa Bahan Pangan

- Pokok Strategis Bersama Bulog dan Petani cabai (Cabe 150 Kg, Beras 1 Ton, Minyak Goreng 400 Kg). Dipimpin oleh Bapak Pj. Bupati Sarolangun.
3. Pada Hari Senin Tanggal 26 September 2022 Operasi Pasar beberapa Bahan Pangan Pokok Strategis Bersama Bulog dan Petani cabai (Cabe 250 Kg, Beras 1 Ton, Minyak Goreng 600 Kg). Dipimpin oleh Bapak Pj. Bupati Sarolangun.
 4. Pada Triwulan III harga rata-rata beberapa bahan pangan pokok dan bahan penting lainnya antara lain ada yang stabil, ada yang mengalami penurunan dan ada yang mengalami kenaikan baik bahan pangan Cabe merah, cabe rawit, minyak sayur kemasan, gula, bawang merah, bawang putih, daging ayam boiler, daging sapi dan telur.

2. Perkembangan Kegiatan di Sektor Peternakan dan Perikanan.

1. Pada Tanggal 04 Juli 2022 dilaksanakan pemantauan dan peninjauan ternak sapi di Desa Serdang Sari Kecamatan Singkut sebanyak 80 ekor sapi.
2. Pada tanggal 6 Juli 2022 dilaksanakan kegiatan pemantauan dan peninjauan ternak sapi Desa Siliwangi Kecamatan Singkut
3. Pada tanggal 6 Juli 2022 dilaksanakan pemantauan Ternak ayam petelur 1.500 ekor, hasil 40 karpet per hari di Desa /Perdamaian Kecamatan Singkut
4. Pada tanggal 6 Juli 2022 dilaksanakan pemantauan Ternak ayam petelur 1.500 ekor, hasil 40 karpet per hari di Desa Perdamaian Kecamatan Singkut
5. Pengawasan dan Pemantauan Ternak untuk Qurban Hari Raya Idul Adha 1443 H Tahun 2022 pada tanggal 7 Juli 2022 dilaksanakan pemantauan dan penyuntikan kerbau yang terkena penyakit PMK dan pemberian label kepada ternak kerbau yang sehat.

3. Pengembangan Kegiatan di Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

1. Pada tanggal 19 Juli 2022 Melaksanakan pemantauan dan monitoring kegiatan SL-GAP Provinsi Jambi bersama Dinas TPHP Kabupaten Sarolangun.
2. Pada tanggal 5 Juli 2022 dilaksanakan monitoring kegiatan pengembangan Kawasan Hortikultura di Desa Bukit Murau Kecamatan Singkut
3. Pada tanggal 01 Agustus 2022 dilaksanakan monitoring bawang merah di Kelompok Tani Bina Jaya di Desa Payolebar Kecamatan Singkut.
4. Pada tanggal 2 Agustus 2022 panen dan paska panen cabe merah di kelompok Tani Makmur Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun
5. Pada tanggal 12 Juli 2022 dilaksanakan monitoring lokasi Kegiatan Pengembangan tanaman bawang merah di Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut
6. Pada tanggal 24 Agustus 2022 dilaksanakan pemantauan dan panen cabe merah di Kelompok Tani Gading Makmur Desa Tinting Kecamatan Sarolangun, yang dipimpin langsung oleh Bapak PJ. Bupati Sarolangun diadiri oleh OPD terkait dan Anggota TPDI Kabupaten Solangun.

--	--

--	--

4. Pengembangan Kegiatan di Sektor Ketahanan Pangan.

1. Pada tanggal 27 Juli 2022 Melaksanakan Monitoring di KWT Gelombang Cinta Desa Suka Maju Kecamatan Mandiangin Timur

2. Pada tanggal 29 Juli 2022 Melaksanakan monitoring di Desa Bukit Murau Kecamatan Singkut

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

4. EVALUASI DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

4.1. EVALUASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Pada umumnya untuk menciptakan pengendalian inflasi Daerah yang efektif dan terarah memperkuat peran dan fungsi TPID Kabupaten Sarolangun dengan melakukan penguatan kelembagaan TPID, peningkatan sektor produksi, efisensi tata niaga, stabilitasi harga dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang.

Langkah-langkah yang diambil Kabupaten Sarolangun untuk memperkuat peran dan fungsi TPID diantaranya sebagai berikut :

1. Pada hari Senin 04 Juli 2022 Rapat Koordinasi TPID dan Satgas Pangan dalam rangka menyambut hari raya Idul Adha Tahun 2022, dipimpin langsung oleh Bapak Pj. Bupati Sarolangun, dengan ini dapat kami sampaikan hasil sebagai berikut :
 - Acara Rapat Koordinasi TPID dan Tim Satgas Pangan dalam rangka Menyambut Hari Raya Idul Adha Tahun 2022 di Kabupaten Sarolangun yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2022, dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Adha Tahun 2022 serta untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga komoditi bahan pangan pokok strategis di Kabupaten Sarolangun.
 - Rapat Koordinasi TPID dan Tim Satgas Pangan dalam rangka Menyambut Hari Raya Idul Adha Tahun 2022 yang dipimpin langsung oleh Bapak Pj. Bupati Sarolangun yang dihadiri oleh Forkopinda, Tim TPID dan Tim satgas Pangan kabupaten Sarolangun.
 - Diharapkan Tim TPID dan Tim Satgas Pangan untuk dapat memahami tugas Tim dan bersinergi dalam upaya pemenuhan ketersediaan pasokan di pasar.

Dinas Perindagkop dan Dinas Ketahanan Pangan setiap hari harus dapat memantau kenaikan harga beberapa bahan pangan pokok dan memastikan ketersediaan stok dan pasokan bahan pokok di distributor/gudang/pasar serta melaporkan kepada Bapak Bupati baik melalui Whatsapp atau melalui surat resmi.

- Dinas Peternakan dan Perikanan, diminta untuk memantau setiap hari memastikan harga daging, ketersediaan daging Sapi/Kerbau, Daging ayam, ikan dan telur agar tidak terjadi kelangkaan dan kenaikan harga yang terlalu tinggi, terutama ternak sapi/kerbau/kambing untuk kebutuhan Qurban, mengecek ternak-ternak dan memastikan tidak terkena penyakit PMK.
- Dinas TPHP, agar dapat memastikan ketersediaan stok padi, jagung, kedelai dan hortikultura agar tidak terjadi kelangkaan.
- Dinas Perhubungan, untuk dapat memastikan jalur distribusi/logistik tidak terganggu.
- Dinas Kominfo agar dapat menyampaikan himbauan kepada masyarakat baik melalui media massa atau media elektronik untuk melakukan konsumsi kebutuhan bahan pokok secara wajar, tidak menimbun stok bahan pangan serta bijak dalam berbelanja.
- Menentukan Jadwal Tim melaksanakan Sidak Pasar dalam rangka melaksanakan pemantauan pergerakan Kelangkaan dan Kenaikan harga kebutuhan bahan pokok serta menjaga ketersediaan kebutuhan bahan pokok pangan aman menghadapi Hari Raya Idul Adha Tahun 2022, serta memastikan hewan korban bebas PMK.

2. Pada Tanggal 09 Juli 2022 Sidak dan pemantauan harga Bahan pangan pokok strategis di Pasar Atas Sarolangun, dilanjutkan dengan sidak agen dan pangkals LPG serta SPBU dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha Tahun 2022, dipimpin langsung oleh Bapak Pj. Bupati Sarolangun bersama TPID dan Tim Satgas Pangan Kab Sarolangun, dengan ini dapat kami sampaikan hasil sebagai berikut :

a. Sidak pasar yang dilaksanakan oleh Tim TPID Tim Satgas Pangan Kabupaten Sarolangun pada tanggal 9 Juli 2022 di Pasar Atas Sarolangun, sidak agen Gas LPG dan pangkalan Gas LPG serta SPBU dipimpin langsung oleh Bapak Pj. Bupati Sarolangun bersama TPID dan Tim Satgas Pangan Kab Sarolangun.

b. Dari hasil sidak Pasar Atas Sarolangun, sidak agen Gas LPG dan pangkalan Gas LPG serta SPBU dapat kami laporkan ada beberapa kebutuhan bahan pokok yang mengalami kenaikan harga diantaranya :

Harga Cabe Merah di pasar atas Sarolangun Bulan Juni 85.000. s/d Rp. 90.000,- mengalami kenaikan pada awal Juli menjadi sebesar Rp. 100.000,-

- Harga Bawang Merah Bulan Juni Rp. 55.000 mengalami kenaikan pada awal Juli sebesar 61.000.
- Harga Bawang Putih Bulan Juni Rp 24.000 pada awal Juli stabil sebesar Rp. 24.000. Harga Daging Sapi awal Bulan Juni Rp. 120.000/Kg mengalami kenaikan yang sangat tinggi pada awal Juli sebesar 150.000/Kg
- Harga Telur Ayam Ras awal Bulan Juni Rp. 44.000 mengalami kenaikan yang sangat tinggi pada awal Juli sebesar 52.000 -

◦

Harga Minyak Goreng Kemasan di pasaran mengalami kenaikan harga sebesar Rp. 23.000 - Rp. 25.000/1 Liter dan 2 Liter 46.000- Rp. 50.000/Liter .

- Harga Minyak Goreng Curah dari Distributor Rp. 14.700 - 15.500, Sedang Harga Minyak Goreng Curah dipasaran dengan harga sebesar Kg. Rp.18.000 - Rp. 20.000/Liter.
- Harga Gula Pasir 1 Kg sebesar Rp. 13.500 mengalami kenaikan sebesar 15.000/ Kg.
- Dari hasil sidak Pasar atas Sarolangun, sidak agen Gas LPG dan pangkalan Gas LPG serta SPBU ditemukan sebagian bahan pokok mengalami kenaikan harga yang sangat tinggi di pasar Sarolangun seperti harga cabe merah, cabe rawit, bawang merah, daging sapi, telur ayam ras, minyak goreng kemasan.
- Stok kebutuhan Gas LPG 3 Kg di Agen PT Andos untuk saat ini sebanyak 164 Tabung dan harga gas LPG di agen sebesar 18.000,- .
- Tera Ulang untuk setiap SPBU dilaksanakan satu kali setahun, SPBU Tanjung Rambai telah dilaksanakan Tera Ulang pada tanggal 9 Juli 2021 oleh Dinas Koperindagkop kabupaten Sarolangun.

3. Pada tanggal 21 Juli 2022 Menidndaklanjuti arahan Bapak Pj. Bupati Sarolangun, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kab Sarolangun melaksanakan peninjauan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan Kabupaten Tanah Daatar sebagai Daerah Penghasil Cabai Merah, dengan ini dapat kami sampaikan hasil sebagai berikut :

A. Studi Tiru Pengembangan Sektor Pertanian ke Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022.

- Rapat dipimpin oleh Bapak Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum. Kabupaten Tanah Datar di dampingi oleh Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian & Kabag PSDA beserta Staf.
- Tim Kabupaten Sarolangun dipimpin oleh Bapak Staf Ahli Bupati Bidang Ekeubang didampingi oleh Kadis Ketahanan Pangan, Kadis Peternakan dan Perikanan, Kabag Perekonomian dan SDA Setda, Kabid Hortikultura Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, dan Staf Analis Kebijakan Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Sarolangun.
- Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat merupakan Kabupaten penerima penghargaan/award sebagai *TPID Kabupaten/Kota Tingkat Nasional Berprestasi untuk Wilayah Sumatra* pada Tahun 2021 dengan program unggulan *Bangcerah* (Pengembangan cabe merah dan bawang merah).
- Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat sebagai Sentra Produksi Cabai Merah dan Bawang Merah, dimana hampir 70 % masyarakat bergerak disektor pertanian dengan luas lahan sekitar 63.000 Ha. Dari luas lahan tersebut $\pm$ 2.078 Ha merupakan lahan tanaman Cabei Merah dan $\pm$ 294 Ha merupakan lahan tanam Bawang Merah, dengan produksi Cabe Merah tahun 2020 sebesar 19.917 Ton dan Bawang Merah sebesar tahun 2020 sebesar 1.701 Ton.
- TPID Kabupaten Tanah Datar melalui peran Bagian Perekonomian & SDA, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melakukan kebijakan dalam Kemajuan TPID dengan
-

telah melaksanakan kerjasama dengan beberapa Daerah antara lain : Kota Pekanbaru, Kabupaten Dumai dan Provinsi Bengkulu.

- Dalam rangka mengendalikan inflasi di sektor pangan, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Toko Tani Indonesia Center (TTIC) Provinsi Sumatra Barat, memasarkan hasil Pertanian dengan cara menggelar kegiatan TTIC setiap hari Jumat disekitar Daerah Perkantoran.
- Untuk Pemasaran hasil pertanian Pemerintah Kabupaten Tanah Datar membuat Aplikasi online dengan nama “Lapau Tani“. Aplikasi ini memudahkan pembeli dan penjual dalam melaksanakan transaksi hasil pertanian, dimana harga yang ditawarkan berada dibawah harga pasar.
- Kabupaten Tanah Datar dalam upaya memperpanjang umur simpan komoditi bawang merah dan cabe merah mendapat bantuan dari PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) berupa 4 Unit rumah pengeringan cabe dan bawang dengan tenaga surya.

B. Studi Tiru Pengembangan Sektor Peternakan ke Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 22 Juli 2022, di Dinas Peternakan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatra Barat.

1. Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah yang menjadi pusat pengemukan sapi dan penghasil telur ayam terbesar di Sumatera Barat.
2. Untuk pengembangan sektor peternakan, Kabupaten Lima Puluh Kota mendapatkan bantuan DAK fisik Tahun 2022 sebesar 2,5 Milyar yang diperuntukan untuk bantuan rumah kompos, pos keswan, sumur dalam dan sarana lainnya.
3. Untuk Ayam Petelur, produksi rata - rata perhari sebesar 400 ribu telur. Selain untuk kebutuhan dalam Kabupaten, hasil produksi juga dipasarkan ke luar daerah termasuk ke pulau Jawa. Untuk pemasaran telur keluar daerah harus mendapatkan surat jalan dari Dinas Peternakan Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Untuk menghindari penyebaran PKM, saat ini Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota memberlakukan lockdown terhadap sentral produksi sapi salah satunya pada Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT), sampai terlaksananya vaksinasi tahap ke-2 terhadap hewan ternak.

C. Rekomendasi

- iii. Dalam rangka mengendalikan laju inflasi terutama pada komoditi cabe merah dan bawang merah, perlu bagi Kabupaten Sarolangun menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar guna memenuhi pasokan cabe merah dan bawang merah di Kabupaten Sarolangun. Kemudian secara teknis dilanjutkan dengan kerjasama antara Asosiasi Petani “Asosiasi Lapau Tani”/ BUMD Pangan Kabupaten Tanah Datar dengan Asosiasi Pedagang/Koperasi/BUMD Pangan yang ada di Kabupaten Sarolangun.
- iv. Perlu membuat sebuah Aplikasi Sistem Informasi SDA, yang memuat integrasi data masing-masing OPD disektor pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan sebagai basis data dalam mengambil kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah.
- v. Perlu membuat Aplikasi pemasaran secara online.
- vi. Dalam rangka menjaga ketersediaan dan pasokan telur di Kabupaten Sarolangun perlu dilakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh kota.
- vii. Pemerintah Kabupaten Sarolangun perlu melaksanakan kerjasama teknik dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk peatihan inseminasi buatan (IB) dan contoh Pengembangan Balai Pembibitan Ternak.

4. Pada tanggal 4 Agustus 2022 Mengikuti Acara High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Perkembangan Inflasi dan Katahanan Pangan Se-Provinsi Jambi yang dilaksanakan secara Zoom Meeting di Ruang Pola Utama Kantor Bupati Sarolangun yang dipimpin langsung oleh Bapak Asisten Administrasi Setda Kabupaten Sarolangun yang dihadiri oleh Anggota TPID dan Tim Satgas Pangan Kabupaten Sarolangun, dengan ini dapat kami sampaikan hasil sebagai berikut :

- a. Acara High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Perkembangan Inflasi dan Katahanan Pangan Se-Provinsi Jambi yang dilaksanakan secara Zoom Meeting pada tanggal 4 Agustus 2022, yang dipimpin langsung oleh Bapak Asisten Administrasi Setda Kabupaten Sarolangun yang dihadiri oleh Anggota TPID dan Tim Satgas Pangan Kabupaten Sarolangun.
- b. Indeks Harga Konsumen Provinsi Jambi pada Juli 2022 tercatat masih mengalami inflasi sebesar 1,27% (mtm) atau 8,55 (yoy). Inflasi Provinsi Jambi secara bulanan pada Juli 2022 lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang mengalami inflasi 0,64% (mtm) atau 4,94% (yoy). Namun inflasi bulan Juli lebih rendah dibandingkan dengan inflasi sebelumnya 1,53% (mtm).
- c. Inflasi Kota Jambi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga pada tujuh kelompok pengeluaran. Hal serupa juga terjadi pada inflasi Kota Muara Bungo yang terbentuk karena adanya kenaikan indeks harga pada sembilan kelompok pengeluaran barang/jasa.
- d. Pada Juli 2022 terjadi peningkatan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) di Provinsi Jambi sebesar 1,26 persen yang terutama disebabkan oleh peningkatan indeks pada delapan (8) kelompok pengeluaran, yaitu Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau; Kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga; Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga; Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya; Kelompok Pakaian dan Alas Kaki; Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran; Kelompok Kesehatan; serta Kelompok Transportasi.
- e. Dari 24 Kota IHK di Sumatera, seluruhnya mengalami inflasi. Inflasi tertinggi Se-Sumatera terjadi di Kota Gunung Sitoli sebesar 1,81% dengan IHK sebesar 115,70 dan terendah di Kota Pematang Siantar sebesar 0,04 % dengan IHK sebesar 112,53. „
- f. Dari 90 Kota IHK Se-Indonesia, seluruhnya juga mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Kendari sebesar 2,27 % dengan IHK sebesar 113,98. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Kota Pematang Siantar dan Kota Tanjung masing-masing sebesar 0,04%. IHK Kota Pematang Siantar sebesar 112,53 dan IHK Kota Tanjung sebesar 113,88.
- g. Pemerintah Provinsi Jambi mengharapkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara Stakeholder dan pemerintah daerah untuk dapat melakukan pengendalian inflasi daerah serta mengantisipasi kenaikan harga pangan.
- h. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat mengambil langkah-langkah dalam rangka mengantisipasi adanya kenaikan harga yang semakin tinggi, salah satunya memastikan stok barang aman sehingga tidak terjadi kelangkaan yang

dapat mempengaruhi kenaikan harga.

- i. Kepada Kabupaten yang menghasilkan bahan pangan seperti Kabupaten Kerinci untuk hasil produksi agar dapat disalurkan ke dalam Provinsi Jambi agar tidak memasarkan ke daerah lain dikarenakan di Provinsi Jambi masih kekurangan bahan pangan
- j. Langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh TPID Provinsi /Kabupaten/Kota untuk menjaga ketersediaan harga pangan di daerah antara lain :
 - Menjaga Keterjangkauan Harga, melaksanakan kegiatan sidak harga pangan strategis, kegiatan pasar murah & Operasi pasar oleh Bulog.
 - Menjaga Ketersediaan Pasokan dengan cara menjaga kecukupan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Bulog, Optimalisasi Produksi oleh Produsen Lokal, Optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD).
 - Kelancaran Distribusi, melaksanakan pendistribusian komoditas, mitigasi risiko dampak faktor cuaca, pelaporan berkala persediaan bahan pangan strategis.
 - Komunikasi Efektif, melaksanakan pemantauan dan peningkatan akurasi data, optimalisasi papan informasi harga pangan strategis, memperkuat koordinasi TPID Provinsi/Kabupaten/Kota, dan edukasi ke masyarakat.

5. Pada tanggal 18 Agustus 2022 mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2022 secara virtual meeting dengan Tema “Sinergi Untuk Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan Nasional” dibuka oleh Bapak Presiden RI, didampingi oleh Menko Perekonomian selaku Ketua TPIP, Mendagri selaku Wakil Ketua TPIP, Gubernur BI dan seluruh Anggota TPIP. Rapat dihadiri oleh Gubernur/ Bupati/ Alikota se Indonesia, Kabupaten Sarolangun dihadiri oleh Bapak Pj. Bupati Sarolangun beserta Tim TPID Kabupaten Sarolangun, dengan ini dapat kami sampaikan hasil sebagai berikut :

a. Rakornas diselenggarakan secara hybrid dari Istana Negara dihadiri secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju.

b. Acara Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2022 dengan Tema “Sinergi Untuk Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan Nasional”, yang dilaksanakan secara Zoom Meeting pada tanggal 18 Agustus 2022, yang dipimpin langsung oleh Bapak PJ. Bupati Sarolangun yang dihadiri oleh Anggota TPID Kabupaten Sarolangun.

c. Dalam Arahan Bapak Presiden RI memberikan 5 (lima) arahan penting kepada TPIP dan TPID dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan untuk mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional, antara lain :

- Memperkuat identifikasi sumber tekanan inflasi di daerah melalui pemanfaatan data makro dan mikro serta data detail.
- Memperluas kerja sama antardaerah (KAD) guna mengurangi disparitas pasokan dan harga antarwilayah. TPIP dan TPID perlu mengidentifikasi wilayah surplus. dan defisit serta menjadi fasilitator untuk mendorong kerja sama antardaerah dalam pengendalian inflasi.
- Menurunkan biaya transportasi dengan memanfaatkan fasilitasi distribusi perdagangan antardaerah dan termasuk menurunkan harga tiket pesawat dengan menambah jumlah

pesawat.

- Mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk mendukung upaya pengendalian inflasi daerah.
- Mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
- Guna menekan kenaikan harga komoditi yang berdampak pada inflasi di suatu daerah dapat dilakukan dengan mendatangkan komoditi dari daerah lain yang memiliki pasokan melimpah.
- Diharapkan kepada setiap daerah untuk terus memantau kenaikan harga yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi di daerah.

d. Terkait tingginya inflasi di daerah Presiden mendorong adanya anggaran tak terduga yang dapat digunakan untuk menutup biaya transportasi/biaya angkut barang yang dapat menyelesaikan inflasi di Daerah.

e. Secara khusus Presiden RI juga menekankan pentingnya melakukan Kerjasama Antar Daerah (KAD) guna mengurangi disparitas pasokan dan harga antar wilayah. TPIP dan TPID perlu mengidentifikasi wilayah surplus, dan defisit serta menjadi fasilitator untuk mendorong kerja sama antar daerah dalam pengendalian inflasi dalam pengendalian inflasi karena saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan berat baik dari global maupun domestik.

f. Provinsi dan Kabupaten/Kota agar dapat segera melakukan dan penyelenggaraan High Level Meeting Rapat Koordinasi di Daerah guna mengatasi Pengendalian Inflasi 2022.

g. Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat dan Daerah, serta instansi terkait akan terus memperkuat sinergi TPIP dan TPID untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan nasional sehingga mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional.

6. Pada tanggal 20 Agustus 2022 Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Se-Provinsi Jambi dalam rangka menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI pada Rakornas Pengendalian Inflasi Nasional tahun 2022 tgl 18 Agustus 2022, dilaksanakan secara Virtual meeting. Rakor membahas langkah-langkah yang perlu dilakukan Kabupaten/Kota dalam rangka menyikapi tingginya tingkat inflasi provinsi Jambi (tertinggi secara nasional). Rapat dihadiri langsung oleh Bapak Pj. Bupati Sarolangun didampingi anggota TPID Kabupaten Sarolangun, dengan ini dapat kami sampaikan hasil sebagai berikut :

- a. Acara Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Provinsi Jambi dalam rangka menindaklanjuti Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2022 yang dilaksanakan secara Zoom Meeting pada tanggal 20 Agustus 2022, yang dipimpin langsung oleh Bapak Pj. Bupati Sarolangun yang dihadiri oleh Anggota TPID dan Tim Satgas Pangan Kabupaten Sarolangun.
- b. Dimana Kabupaten/Kota diminta untuk mengikuti acara Rakor bersama TPID Provinsi Jambi guna menindaklanjuti Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2022.

Menurut Data dari Badan Statistik dapat diketahui bahwa saat ini Provinsi Jambi berada

c.

di urutan Nomor 1 (satu) Tingkat Nasional inflasi tertinggi hingga per Agustus 2022 dan Kabupaten Bungo berada di urutan ke dua yang mengalami inflasi tertinggi.

- d. Badan Statistik Provinsi Jambi mencatat Inflasi Provinsi Jambi mencapai 8,55 % menjadi inflasi tertinggi di Indonesia yang artinya jauh lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya, berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) harga pangan mengalami kenaikan dratis seperti cabe merah, bawang merah, cabe rawit, bawang putih dan beras.
- e. Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Provinsi Jambi, perlu dilakukan sinkronisasi Tim Pengendalian inflasi Daerah (TPID) dengan Tim Pengendalian inflasi yang ada di pusat sehingga langkah-langkah untuk menekan angka inflasi dapat dilakukan dengan sinergitas bersama.
- f. Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan satgas pangan terus memantau dan mengecek terhadap kenaikan harga dan ini diantisipasi adanya kenaikan harga yang semakin tinggi, dan dapat memastikan persediaan/stok pangan agar tidak terjadi kelangkaan yang dapat menjadi salah satu faktor kenaikan inflasi di daerah.
- g. Diminta kepada OPD terkait agar dapat mengecek terhadap kenaikan harga danantisipasi adanya kenaikan harga yang semakin tinggi, serta memastikan stok kebutuhan barang aman agar tidak terjadinya kelangkaan yang dapat menjadi faktor penyebab kenaikan inflasi di daerah.
- h. Guna mengatasi pengendalian inflasi di daerah, Pemerintah Provinsi Jambi berkerjasama dengan bank Indonesia Jambi akan melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi di Provinsi Jambi, karena hingga saat ini Provinsi Jambi masih merupakan daerah yang cukup tergantung dengan pasokan dari area sentra produksi di luar Provinsi.
- i. Inflasi di Provinsi Jambi dapat disebabkan juga dengan cuaca yang kurang kondusif dan mengganggu produktivitas serta kelancaran distribusi pasokan dari luar yang membuat proses pemenuhan stok menjadi sedikit terhambat.
- j. Pemerintah Daerah terkait pengendalian inflasi telah berupaya dengan menjaga keterjangkauan harga melalui sidak harga pangan, pasar murah, operasi pasar bulog, serta mendorong realisasi pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam bentuk natura pangan sehingga mengutangi tekanan harga di pasar.
- k. Untuk menekan inflasi di Daerah diharapkan Tim TPID dan Tim Satgas Pangan agar terus meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan baik antara stakeholder dan forkopinda untuk mengatasi inflasi dan mengatasi kenaikan harga pangan dengan cara melakukan pemantauan, pengecekan dan pengawasan terhadap kenaikan harga barang dan pangan di daerah.

7. Pada tanggal 23 Agustus 2022 Rapat Koordinasi TPID Prov/Kab/Kota se-Indonesia dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden RI dalam Rakornas TPID. Dilaksanakan secara hybrid. Rapat dipimpin oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Rapat dihadiri oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun bersama Anggota TPID Kabupaten Sarolangun, dengan ini dapat kami sampaikan hasil sebagai berikut :

- a. Acara Rapat Koordinasi dalam rangka menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia terkait beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah terkait Pengendalian Inflasi Daerah, yang dilaksanakan secara Zoom Meeting pada tanggal 23 Agustus 2022, yang dipimpin oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun yang dihadiri oleh Anggota TPID dan Tim Satgas Pangan Kabupaten

Sarolangun.

- b. Berdasarkan data Badan Statistis Provinsi Jambi mencatat Inflasi Provinsi Jambi mencapai 8,55 % menjadi inflasi tertinggi nasional urutan nomor I (satu) di Indonesia.
- c. Pemantauan Pengendalain Inflasi Provinsi Jambi berdasarkan data indikasi di dua daerah yakni Kota Jambi dan Kabupaten Bungo yang saat ini mengalami kenaikan harga yang sangat drastis sekali.
- d. Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi pengendalian inflasi di daerah, saat ini Pemerintah Provinsi Jambi menunggu instruksi dari Pusat untuk dapat membantu dana bagi warga miskin dengan menggunakan anggaran yang ada di pusat, dan Pemerintah menargetkan inflais Provinsi Jambi dapat turun pada akhir bulan ini.
- e. Diminta kepada para Gubernur/Bupati/Wali Kota untuk melakukan optimalisasi anggaran dalam APBD yang terkait dengan pengendalian inflasi daerah antara lain menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerja sama antar daerah, serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di masing-masing daerah.
- f. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri bahwa Pemerintah Daerah dapat menggunakan Dana Belanja Tidak Tetap (BTT) untuk menekan inflasi di Daerah.
- g. Diharapkan Dana Belanja Tidak Tetap (BTT) dapat digunakan untuk membantu penduduk miskin di Provinsi Jambi, menggunakan data Dinas Sosial untuk mengintervensi membantu masyarakat miskin di daerah.
- h. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil, serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, pemerintah daerah diminta untuk menyediakan anggaran untuk dua hal yaitu :
 - Mendukung tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
 - Mengendalikan harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan sembilan bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.
 - Pemerintah daerah harus dapat menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah melaksanakan langkah-langkah strategis untuk mengatasi inflasi di daerah yaitu dengan melaksanakan operasi pasar untuk komoditi bahan pangan pokok di daerah dan menjalin Kerjasama Antar Daerah (KAD) guna memenuhi kebutuhan agar dapat mengatasi kenaikan harga bahan pangan di daerah.
 - Pemerintah Provinsi menghimbau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat berjasama dalam mengatasi dan penanganan pengendalian inflasi di daerah.
 - Memperkuat sinergi antara pusat dan daerah untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan melalui Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi (TPIP dan TPID), serta akselerasi pelaksanaan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan (GNPIP).

8. Pada hari Rabu tanggal 24 agustus 2022 Menindaklanjuti tingginya tingkat inflasi Provinsi

Jambi yang dipicu oleh salahsatunya tingginya harga Cabai Merah, Bapak Pj. Kabupaten Sarolangun Meninjau seklaigus Panen Raya Cabai Merah bersama petani cabai merah dari Kelompok Tani Gading Makmur, Desa Tinting, Kec Sarolangun Kab Sarolangun.

9. Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Jambi bersama Menteri Dalma Negeri dalam rangka optimalisasi pengendalian inflasi Provinsi Jambi, dilaksanakan di Lantai 2 Gedung Mahligai 9 Bank Jambi. Rapat dihadiri oleh Bapak Pj. Bupati Sarolangun, Sekda Kab Sarolangun dan Kabag Perekonomian & SDA Setda Kabupaten Sarolangun.

10. Pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Membahas Langkah Konkret Sebagai Tindak Lanjut Arahkan Presiden Pada Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2022 ,dipimpin oleh Menko Bidang Marves dan Mendagri,mendengar pemaparan tentang kebijakan dan sinkronisasi program kegiatan inflasi oleh 11 (sebelas/ Ketua Lembaga, dilaksanakan secara virtual zoom meeting. Rapat dihadiri oleh Bapak Pj. Bupati Sarolangun, Forkompinda, dan seluruh anggota TPID Kabupaten Sarolangun, dengan ini dapat kami sampaikan hasil sebagai berikut :

1. Acara Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Membahas Langkah Konkret Sebagai Tindak Lanjut Arahkan Presiden Republik Indonesia, pada Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2022 yang dilaksanakan secara Zoom Meeting pada tanggal 30 Agustus 2022. Di Kabupaten Sarolangun dipimpin langsung oleh Bapak Bupati Sarolangun yang dihadiri oleh Anggota TPID dan Tim Satgas Pangan Kabupaten Sarolangun.
2. Inflasi yang terjadi di dunia cukup tinggi sehingga mengalami gangguan ekonomi yang menyebabkan krisis keamanan, krisis politik, pengangguran, kemiskinan.
3. Dapat diketahui bahwa ekonomi Indonesia tumbuh relative cukup baik, namun ada hal yang perlu diwaspadai ketidak mampuan Negara-negara lain mengatasi pandemic Covid-19 dan tidak mampu menjaga ekonomi yang bisa berdampak ke Indonesia karena Indonesia merupakan bagian dari system globalisasi ekonomi.
4. Dalam rapat Menteri Dalam Negeri RI menegaskan kembali pernyataan Presiden RI dalam pengendalian inflasi akibat dari pandemi Covid-19 di daerah, diperlukan langkah-langkah antispatif dan sinergitas semua pihak di setiap daerah.
5. Inflasi nasional sampai bulan Juli 2022 cukup tinggi yaitu 4,49 %, yang harus diwaspadai komponen penyumbang inflasi yaitu inflasi bahan makanan dan inflasi energi yang cukup tinggi, dimana pemerintah masih menanggung beban subsidi yang besar terutama di sektor energi dan pangan.
6. Komoditas pangan merupakan utama yang menjadi penyumbang kenaikan harga pangan antara lain cabe merah, bawang merah, cabe rawit, daging ayam ras dan telur.
7. Penyebab terjadinya inflasi antara lain karena uang Negara beredar lebih banyak, kenaikan suku bunga, supply barang kurang, distribusi komoditas yang terganggu dan pupuk subsidi mahal.
8. Sebagai Tindaklanjutan Pengendalian Inflasi oleh Kementrian menerbitkan Surat Edaran

Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah.

9. Ada beberapa solusi yang harus dilakukan daerah di dalam Pengendalian Inflasi antara.
 - Kominikasi Publik dan Aktifkan TPID dan Satgas Pangan
 - BBM subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu
 - Laksanakan gerakan penghematan energy
 - Gerakan tanam pangan cepat panen
 - Laksanakan Kerjasama Antar Daerah
 - Intensifkan jaringan pengaman sosial (BTT, Bansos, Anggaran Desa, DAU dan Bansos Pusat)
 - BPS dan BI untuk dapat umumkan angka inflasi hingga Kabupaten/Kota
 - Kunci Utama Pengendalian Inflasi menjadi isu prioritas
10. Untuk itu Pemerintah Pusat meminta kepada Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan pengendalian inflasi di daerah.
11. Pemerintah Pusat mengingatkan jajaran terkait agar bekerjasama untuk mengendalikan inflasi sehingga dibawah angka 3 %, apabila seluruh Kepala Daerah dapat dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) maupun Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP).

11. Pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 Kunjungan Pemkab Tanah Datar ke Kabupaten Sarolangun dalam rangka menindaklanjuti Kerjasama Antar Daerah (KAD) sektor pangan antara Pemkab Tanah Datar dengan Pemkab Sarolangun. Dipimpin Bapak Asisten Ekbang Setda Kab. Sarolangun, dengan ini dapat kami sampaikan hasil sebagai berikut :

1. Pertukaran informasi antar daerah dan Penjajakan Kerjasama Antar Daerah antara Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah.
2. Pemerintah Kabupaten Sarolangun : Staf Ahli Bupati Bidang Ekeubang, Asisten Ekbang, Bappeda, Dinas Perindagkop, Dinas TPHP, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Bagian Perekonomian dan SDA dan Bagian Pemerintahan.
3. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar : Asisten Ekbang, Dinas Perindagkop, Dinas TPHP, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Bagian Perekonomian dan SDA dan Bagian Pemerintahan.
4. Kabupaten Tanah Datar menawarkan Kerjasama Antar Daerah untuk semua sektor.
5. Seluruh anggota TPID yang hadir menyepakati rencana Kerjasama Antar Daerah dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya Kabag Perekonomian dan SDA membuat nota dinas kepada Bupati Sarolangun untuk meminta persetujuan.
6. Kerjasama dimulai dari penandatanganan MoU, dilanjutkan dengan Perjanjian Kerjasama antara Instansi/OPD masing-masing K
7. Kerjasama Antar Daerah diharapkan tidak hanya dengan Kabupaten Tanah Datar, namun juga dengan daerah lain seperti Kabupaten Rejang Lebong, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, untuk memperbanyak opsi dalam menjalin kebijakan nantinya.

12. Pada hari Sabtu Tanggal 3 September Turun kepasar bersama TPID Kabupaten Tanah Datar guna meninjau dan memantau distributor di pasar sarolangun,

13. Pada hari Senin tanggal 5 September 2022 Rapat Koordinasi Membahas Langkah Konkret Dalam rangka Menindaklanjuti Arahan Presiden Terkait Pengendalian Inflasi Daerah secara zoom meeting. Pemaparan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung dan Kepala BPKP. Rapat dihadiri langsung oleh Bapak Pj. Bupati Sarolangun bersama Forkompinda dan anggota TPID Kabupten Sarolangun. Rapat membahas tentang PMK 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penangan Dampak Inflasi Tahun 2022.

14. Pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 Rapat Koordinasi TPID Kabupaten Sarolangun dalam rangka menyusun rencana program kegiatan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penangan Dampak Inflasi Tahun 2022, dengan ini dapat kami sampaikan hasil sebagai berikut :

1. cara Rapat Koordinasi TPID Kabupaten Sarolangun dalam rangka menyusun rencana program kegiatan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penangan Dampak Inflasi Tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2022, rapat dipimpin oleh Bapak Asisten Ekbang Setda dan di hadir oleh OPD terkait.
1. Program Kegiatan Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penangan Dampak Inflasi Tahun 2022, diberikan dalam jangka waktu 3 Bulan (Oktober s/d Desember 2022).
2. Di kabupaten Sarolangun Dana yang tersedia saat ini dana Bansos sebesar 4,6 Triliun, Dana BT 1,4 Triliun termasuk Dana Cadangan Bencana.
3. Dalam tahap-tahap ini di harapkan kepada OPD terkait agar dapat segera menyampaikan usulan-usulan untuk penggunaan Dana BTT maupun dana Bansos.
 - Dinas TPHP mengusulkan bantuan berupa pupuk dan bibit tanaman untuk para petani yang terkena musibah banjir.
 - Dinas Koperindagkop mengusulkan bantuan untuk para UMKM.
 - Dinas Ketahanan Pangan akan mengusulkan untuk bantuan kegiatan KWT per kelompok.
 - Dinas Peternakan dan Perikanan mengusulkan bantuan bibit ternak ayam dan pakan ternak ayam untuk Perkelompok.
 - Dinas Perhubungan akan mengusulkan bantuan transportasi untuk mobil Pedesaan/Kecamatan.
 - Untuk bantuan perluasan dapat diberikan bantuan kepada : Tenaga Honorer, Guru

Ngaji, Pegawai Sarak, PKL.

- Untuk rencana usulan bantuan honorer akan dipilah terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan seperti honorer suami istri akan di berikan satu bantuan, dan untuk honorer suami atau istri PNS tidak mendapat bantuan.
4. Diharapkan kepada OPD terkait agar segera menyampaikan usulan program kegiatan yang terkait dengan kegiatan Belanja Wajib Dalam Rangka Penangan Dampak Inflasi Tahun 2022.
 5. Program kegiatan Belanja Wajib Dalam Rangka Penangan Dampak Inflasi Tahun 2022 paling lambat tanggal 15 September 2022 sudah dapat difinalkan dan disampaikan ke Pusat.

15. Pada hari Senin tanggal 12 September 2022 Rapat membahas Pengendalian Inflasi di Daerah yang dilaksanakan secara zoom meeting. Rapat dihadiri langsung oleh Bapak Pj. Bupati Sarolangun bersama anggota TPID Kabupten Sarolangun, dengan ini dapat kami sampaikan hasil sebagai berikut :

- Rapat membahas Pengendalian Inflasi di Daerah yang dilaksanakan secara zoom meeting yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia dan diikuti oleh seluruh Kepala Daerah Se-Indonesia.
- Rapat membahas Pengendalian Inflasi di Daerah yang dilaksanakan secara zoom meeting Pada hari Senin tanggal 12 September 2022 Rapat dihadiri langsung oleh Bapak Pj. Bupati Sarolangun bersama anggota TPID Kabupten Sarolangun.
- Rapat membahas Pengendalian Inflasi di Daerah Presiden RI meminta kepada Pemerintah Daerah bekerjasama mengendalikan laju inflasi di Indonesia dan menargetkan inflasi bisa berada dibawah 5 % pada tahun ini.
- Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan sejumlah langkah antisipasi guna mengendalikan inflasi di daerah.
- Kenaikan harga Bahan Bakar minyak (BBM) pada tanggal 3 September 2022 sudah diprediksi berdampak pada konsisi perekonomian secara nasional, termasuk dalam hal inflasi.
- Untuk mengendalikan inflasi pemerintah daerah diminta menyiapkan 2 % dari Dana Transfer Umum (DTU) yaitu Anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk pemberian subsidi akibat penyesuaian kenaikan harga BBM, misalnya dalam bentuk Bantuan Sosial (Bansos) kepada rakyat yang membutuhkan atau dimanfaatkan untuk membantu UMKM dengan cara membeli bahan baku.
- Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran.
- Sesuai dengan peraturan menteri Keuangan nomor 134/PMK.07/2022, maka Pemerintah berkontribusi memberikan dukungan berupa penganggaran belanja wajib perlindungan sosial untuk periode Oktober s/d desember 2022 sebesar 2 % dari Dana Transfer Umum (DTU) di luar Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditentukan penggunaannya.
- Dana wajib perlindungan sosial dipergunakan untuk pemberian bantuan sosial kepada ojek, UMKM dan nelayan, Penciptaan lapangan kerja, dan Pemberian subsidi sector transportasi angkutan umum di daerah.
- Penganggaran Belanja wajib Perlindungan Sosial dilakukan dengan Perubahan Peraturan Kepala Daerah mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah mengenai Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2022 atau telah melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

- Daerah wajib menyampaikan laporan penganggaran belanja wajib paling lambat tanggal 15 September 2022, dan setiap tanggal 15 bulan berikutnya.

16. Pada Hari Rabu tanggal 14 September 2022 Rapat Koordinasi Pusat dan daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022 dengan tema "Sinergi dan Inovasi Untuk Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan", yang dilaksanakan secara zoom meeting. Rapat dihadiri oleh Bapak Asisten Ekbang Setda Kabupaten Sarolangun bersama Anggota TPID Kabupaten Sarolangun, dengan ini dapat kami sampaikan hasil sebagai berikut :

- Acara Rapat Koordinasi Pusat dan daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022 dengan tema "Sinergi dan Inovasi Untuk Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan", yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2022 di ruang Pola Utama Kantor Bupati Sarolangun Rapat dihadiri oleh Bapak Asisten Ekbang Setda Kabupaten Sarolangun bersama Anggota TPID Kabupaten Sarolangun.
- Rapat Koordinasi Pusat dan daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022 dengan tema "Sinergi dan Inovasi Untuk Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan, Gerakan nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP)". Di kabupaten Sarolangun Rapat dipimpin oleh Bapak Asisten Ekbang Setda Kabupaten Sarolangun dan di hadiri oleh Anggota TPID Kabupaten Sarolangun.
- Rapat Koordinasi Pusat dan daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022, Pemerintah Pusat meminta kepada Pemerintah Daerah saling bekerjasama dalam upaya pengendalian inflasi di daerah diseluruh Indonesia.
- Terkait inflasi dampak kenaikan Bahan bakar Minyak (BBM) pemerintah akan berupaya menjaga kestabilan harga pada 2 hal yaitu Inflasi dari harga bahan pangan dan transportasi.
- Pemerintah Pusat mengatakan masih ada 2 Kabupaten/kota yang masih menyumbang tinggi terhadap inflasi antara lain : Kota Luwuk Sulawesi Tengah sebesar 7,8 %, Kota Jambi sebesar 7,7 %, Kabupaten Kota Baru Kalimantan selatan sebesar 7,6 5, dan kota Tanjung Selor Kalimantan Utara sebesar 7,4 %.
- Pemerintah Pusat meminta kepada Pemerintah setempat segera melakukan intervensi agar inflasi dan dampak terhadap kemiskinan dapat ditekan, salah satunya dengan mengintervensi kenaikan sejumlah harga bahan pokok yang melonjak.
- Ada delapan langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi di daerah pada rakorpusda pengendalian inflasi daerah tahun 2022.
- Memperluas kerjasama Antar Daerah (KAD) terutama untuk daerah surplus/deficit dalam menjaga ketersediaan suplai komoditas.
- Melaksanakan Operasi Pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholders.
- Pemanfaatan platform perdagangan digital untuk memperluas distribusi.
- Menggunakan Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) dalam Pengendalian inflasi, mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk tematik ketahanan pangan dan pemanfaatan 2 5 DTU untuk sector transportasi dan tambahan perlindungan sosial.
- Mempercepat implementasi program tanam panganpekarangan (cabai), untuk mengantisipasi tingginya permintaan di akhir tahun.

Menyusun Neraca Komoditas Pangan Strategis oleh seuruh Pemerintah Daerah.

- Memperluas sarana-prasarana penyimpanan produk hasil panen terutama daerah sentral produksi.
- Memperkuat sinergi TPIP dan TPID melalui Gerakan nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk mempercepat stabilitas harga.

17. Pada Hari Jum'at Tanggal 16 September 2022 Operasi Pasar beberapa Bahan Pangan Pokok Strategis Bersama Bulog dan Petani cabai (Cabe 150 Kg, Beras 1 Ton, Minyak Goreng 400 Kg). Dipimpin oleh Bapak Pj. Bupati Sarolangun , dengan ini dapat kami sampaikan hasil sebagai berikut :

- Pemerintah Kabupaten Sarolangun melaksanakan kegiatan Operasi Pasar Bahan Pokok strategi dalam rangka menekan dan mengendalikan angka inflasi di daerah
- Operasi Pasar Pemerintah Kabupaten bekerjasama dengan Perum Bulog dan Petani Cabe Desa Tinting Kecamatan Sarolangun yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 di Laman Basamo Kabupaten Sarolangun, dipimpin langsung oleh Bapak Bupati Sarolangun dihadiri oleh Anggota TPID Kabupaten Sarolangun.
- Kegiatan Operasi Pasar ada beberapa Bahan Pangan Pokok Strategis dari Bulog dan Petani cabai, Operasi pasar mencakup Cabe merah sebanyak 150 Kg dari Petani cabai Desa tinting dan Beras dalam kategori medium sebanyak 1 Ton, Minyak Goreng kemasan sebanyak 400 Kg dari Perum Bulog Sarko.
- Tingginya harga cabe merupakan salah satu faktor penyebab tingginya angka inflasi di Provinsi Jambi, termasuk daerah Kabupaten Sarolangun.
- Akibat dari tingginya harga cabe di pasar maka Tim TPID Kabupaten Sarolangun bekerjasama dengan Perum Bulog dan petani Cabai melaksanakan Operasi pasar pangan ada beberapa Bahan Pokok yang dilaksanakan di Laman Basamo Kabupaten Sarolngun.
- Harapan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan diadakannya Operasi Pasar pangan tentu diharapkan dapat membantu masyarakat Kabupaten sarolangun, karena harga yang dijual jauh lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar.
- Seperti harga cabe merah dijual dengan harga Rp. 45.000/Kg, beras kualitas medium dijual dengan harga Rp. 8.400/Kg, dan minyak goring dengan harga sebesar Rp. 12.500/Kg.
- Operasi Pasar ini akan terus dilaksanakan di berbagai tempat di wilayah Kota Sarolangun khususnya di Kelurahan Pasar, Kecamatan Sarolangun, dan juga operasi pasar akan di laksanakan di Lapangan Gunung Kembang Kabupaten Sarolangun.
- Pemerintah Kabupaten berharap dengan adanya opersi pasar agar harga cabe dapat menurun harganya dan dapat terjangkau oleh masyarakat.

18. Pada Hari Kamis tanggal 22 September 2022 Rapat Koordinasi Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Wajib dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah Dipimpin oleh Bapak Asisten Ekbang Setda Kab. Sarolangun.

19. Pada Hari Senin Tanggal 26 September 2022 Operasi Pasar beberapa Bahan Pangan Pokok Strategis Bersama Bulog dan Petani cabai (Cabe 250 Kg, Beras 1 Ton, Minyak Goreng 600 Kg). Dipimpin oleh Bapak Pj. Bupati Sarolangun, dengan ini dapat kami sampaikan hasil sebagai berikut :

1. Operasi Pasar Murah Bahan Pangan Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2022 di Lapangan Gunung Kembang Kabupaten Sarolangun yang diperuntukan khusus untuk Pegawai honorer dan ASN, dipimpin langsung oleh Bapak Pj. Bupati Sarolangun dihadiri oleh Anggota TPID Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Kabupaten Sarolangun melaksanakan kegiatan Operasi Pasar Bahan Pokok strategi dalam rangka menekan dan mengendalikan angka inflasi di daerah bekerjasama dengan Perum Bulog dan Petani Cabe Desa Tinting Kecamatan Sarolangun.
3. Operasi pasar merupakan kegiatan yang kedua kalinya dilaksanakan di Kabupaten Sarolangun yang pertama di laksanakan di laman Basamo Kabupaten Sarolangun yang diperuntukan khusus untuk masyarakat umum.
4. Kegiatan Operasi Pasar Bahan Pangan ini masih sama dengan Operasi pasar sebeumnya, Operasi pasar mencakup Cabe merah sebanyak 250 Kg dari Petani cabai Desa Tinting dan Beras dalam kategori medium sebanyak 1 Ton, Minyak Goreng kemasan sebanyak 600 Kg dari Perum Bulog Sarko.
5. Seperti harga cabe merah dijual dengan harga Rp. 45.000/Kg, sedangakn beras kualitas medium dijual dengan harga Rp. 44.000/5 Kg, dan minyak goreng dengan harga sebesar Rp. 12.500/Kg.
6. Tingginya harga cabe merupakan salah satu faktor penyebab tingginya angka inflasi di Provinsi Jambi, termasuk daerah Kabupaten Sarolangun.
7. Akibat dari tingginya harga cabe di pasar maka Tim TPID Kabupaten Sarolangun bekerjasama dengan Perum Bulog dan petani Cabai melaksanakan Operasi pasar murah guna mengurangi beban para pegawai honorer dan Pegawai tetap di Kabupaten Sarolangun karena harga yang dijual jauh lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar.
8. Pemerintah Kabupaten berharap dengan adanya opersi pasar agar harga cabe dapat menurun harganya dan dapat terjangkau oleh masyarakat di Kabupaten Sarolangun,

20. Pada Hari Senin tanggal 26 September 2022 Rapat Koordinasi Finalisasi Rencana Program Perlindungan Sosial Kabupaten Sarolangun, dipimpin oleh Bapak Sekretaris Daerah Kab. Sarolangun.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

5. REKOMENDASI KEBIJAKAN INFLASI DAERAH

Kebijakan yang dapat ditempuh oleh TPID Kabupaten Sarolangun bersama OPD terkait dalam kerangka mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan bahan pokok dan bahan penting lainnya guna stabilisasi harga, Pemerintah Daerah dapat diambil beberapa kebijakan adalah :

1. Dengan lahirnya kepres Nomor 23 tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan Kepmendagri No.500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, maka daerah harus menyesuaikan pembentukannya di daerah masing-masing sehingga sistem yang terbangun dapat membentuk konektivitas antar TPID diseluruh Indonesia.
2. Terkait hal tersebut, TPID Kabupaten Sarolangun telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati yang terkait tugas, susunan keanggotaan TPID, pembinaan dan pengawasan TPID Kabupaten Sarolangun. Penguatan TPID sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi.
3. TPID Kabupaten Sarolangun agar memperkuat koordinasi dalam pengendalian harga yang terkait faktor musiman seperti tanaman pangan, sekolah, liburan, hari besar keagamaan nasional dan sebagainya serta terkait infrastruktur pertanian, serana & prasarana distribusi hasil pangan dalam hal ini mengefektifkan fungsi pasar.
4. Perlu adanya Kerjasama Antar Daerah (KAD) antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi maupun antar Kabupaten/Kota di luar Provinsi Jambi, sehingga masing-masing OPD terkait memiliki data akurat mengenai ketersediaan bahan pangan pokok di lapangan sehingga pemenuhan kebutuhan dapat dilakukan antar Kabupaten/Kota. Kerjasama Antar Daerah (KAD) juga dapat menjadi nilai tambah dalam penilaian Evaluasi Laporan Tahunan.
5. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk dapat memahami tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Tim, mengingat TPID sangat penting guna memantau ketersediaan stok distribusi dan kebutuhan bahan pangan, perkembangan harga bahan pangan dan harga bahan pokok lainnya di Daerah.
6. Melaksanakan pengawasan terhadap penerapan Harga Eceran Tertinggi sesuai ketentuan yang berlaku dan memastikan jalur Distribusi tidak terganggu dan menjaga distribusi pasokan bahan pangan dari sentra produksi ke pusat perdagangan berjalan dengan lancar.
7. Memastikan ketersediaan bahan pangan pokok, bahan bakar minyak dan gas untuk mengendalikan inflasi di daerah.
8. Memperkuat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sarolangun melalui Rapat Koordinasi di daerah.
9. Kabupaten Sarolangun akan melaksanakan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan Kabupaten Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat

Sarolangun, Desember 2022

Ketua Harian TPID

Sekretaris Daerah

Ttd

Ir. Endang Abdul Naser

Pembina utama Madya

Nip. 19631010 199203 1 007